

PENGARUH TINGKAT EFISIENSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE

*The Effect Of Regional Financial Efficiency Level On Budget Performance Of
Regional Original Income In Parepare City For 2014-2018 Period*

Yadi Arodhiskara, Muhammad Hatta, Ariana

Email : yadhi01@gmail.com¹, muhammadhatta@gmail.com², ariana03@gmail.com³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh tingkat efisiensi keuangan daerah terhadap kinerja anggaran pendapatan asli daerah di Kota Parepare Tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yakni Dokumen-dokumen keuangan daerah Kota Parepare tahun 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: Efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja anggaran PAD di Kota Parepare. Efisiensi keuangan daerah untuk periode tahun 2014 – 2018, nilainya berturut turut adalah: 15,20%, 17,24%, 14,67%, 13,07%, dan 12,82%. Sedangkan kinerja anggaran PAD yang diukur berdasarkan rasio efektivitas PAD untuk periode tahun 2014 – 2018 nilainya berturut-turut adalah: 130,12%, 94,42%, 98,77%, 99,74%, dan 89,07%. Kedua rasio tersebut bergantung kepada realisasi PAD yang diterima oleh daerah.

Kata Kunci: Efisiensi Keuangan Daerah, Kinerja Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine the effect of regional financial efficiency level on the budget performance in Regional Original Income in the City of Parepare for 2014-2018 period. The data collection techniques used in this study are observation and documentation. The subjects in this study were the research samples, namely the regional financial documents of Parepare City for 2014-2018 period.

This study uses quantitative analysis. The results of the study concluded that: regional financial efficiency affects the budget performance of Regional Original Income in Parepare City. Regional financial efficiency for 2014 – 2018 period, the successive values are: 15.20%, 17.24%, 14.67%, 13.07% and 12.82%. Meanwhile, the budget performance of Regional Original Income as measured based on the effectiveness ratio for 2014 - 2018 period, the values were: 130.12%, 94.42%, 98.77%, 99.74% and 89.07%. Both of these ratios depend on the realization of Original Regional Income received by the regions.

Keywords: Regional Financial Efficiency, Budget Performance of Original Regional Income



PENDAHULUAN

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2004: 9).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2004: 9).

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2004: 121).

Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus memenuhi unsur kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Kinerja keuangan daerah yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan daerah, yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila hasil atau pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan telah terlaksana dengan baik. Namun apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Faktanya penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan daerah yang paling penting adalah memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup. Semakin besar presentasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran daerah maka kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan sudah semakin baik (Abate dalam Karlina, 2017).

Dalam konteks pemerintahan, *moral hazard* pemerintah daerah dipertanyakan dalam hal ini tentang kelanjutan penggunaan penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju, sehingga pengalokasian untuk belanja modal perlu menjadi perhatian. Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan, tidak hanya untuk belanja modal saja (Handayani, 2017).

Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Mahmudi, 2006).

Kinerja keuangan daerah tak lepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan target sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, selain itu merencanakan anggaran belanja yang penting untuk pembangunan daerah. Sehingga keberhasilan daerah ditentukan oleh kemampuan daerah membangun daerahnya yang dibiayai dari penerimaan pemerintah daerah.

Khusus pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, harus memperhatikan aspek efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dalam membelanjakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang digali dari potensi daerah masing-masing, perlu terus

ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk pembangunan daerahnya. Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*tax assignment*), pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi pembiayaan daerah.

Di Kota Parepare, pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Dimana dalam pengelolaannya, memperhatikan aspek kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik, termasuk di dalamnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare bertugas merencanakan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja daerah. Khusus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, BKD memperhatikan efisiensi pengelolaan, dalam hal ini belanja untuk pembangunan Kota Parepare. Berikut data rencana penerimaan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, untuk periode tahun 2014 – 2018.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare 2014-2018

Tahun	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	86.131.560.841	110.484.044.627,51
2015	122.188.461.211	118.633.980.512,35
2016	138.015.117.571	136.312.870.315,73
2017	140.990.173.492	140.604.604.048,48
2018	150.834.948.804	134.343.383.709,76

Sumber: Data olahan BKD Kota Parepare, 2020

METODE PENELITIAN

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan pada bulan September – November 2020. Sementara tempat pelaksanaan penelitian, direncanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare.

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Berdasarkan uraian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, yang bisa menjadi sumber data atau masukan bagi pengolahan data penelitian.

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dibutuhkan untuk pengolahan dan analisis data. Dari seluruh data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare, yang menjadi populasi penelitian, diseleksi berdasarkan kebutuhan, sehingga diperoleh sampel yakni data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare untuk periode tahun 2014 – 2018 (periode 5 tahun).

Variabel-variabel utama yang diteliti adalah: 1) Efisiensi keuangan daerah sebagai variabel bebas (X); dan 2) Kinerja Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (Y). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan alat analisis data adalah analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana variabel:

Y	=	Efektivitas PAD
X	=	Efisiensi
a	=	Parameter intercept;

b = Parameter koefisien regresi variabel bebas;
 Nilai a dan b dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

dimana n adalah jumlah data

Nilai variabel X, dan Y dihitung dengan menghitung rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD (X)} = \frac{\text{total Belanja untuk PAD}}{\text{total PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas (Y)} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

Secara statistik, ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik t.

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu maka variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Jika *adjusted* R^2 mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).

Dengan tingkat signifikan 5% (0,05), kriteria pengujianya :

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

1. Efisiensi Keuangan Daerah

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah, untuk mengukur efisiensinya diperlukan data biaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah. Efisiensi PAD merupakan perbandingan antara biaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, dalam satuan persen.

Tabel 2. Efisiensi Keuangan Daerah Periode Tahun 2014 – 2018 (5 tahun)

Tahun	Biaya untuk PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Efisiensi (%)
2014	17.031.344.993,42	112.070.916.727,51	15,20
2015	19.890.521.485,64	115.369.533.323,35	17,24
2016	19.999.527.158,75	136.313.232.054,73	14,67
2017	18.384.398.373,36	140.621.664.388,48	13,07
2018	17.229.342.560,21	134.343.383.709,76	12,82

Sumber: data olahan BKD, 2020

Biaya dan realisasi PAD merupakan data dokumen keuangan yang diperoleh dari BKD Kota Parepare, sedangkan efisiensi adalah olahan data, dengan menggunakan rumus rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya untuk PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Biaya PAD merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan hasil/pendapatan bagi daerah yang bersumber dari PAD. Interpretasi rumus rasio efisiensi adalah: diharapkan bahwa biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, sedangkan realisasi PAD yang didapatkan semaksimal mungkin. Ini berarti bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh dengan cara yang makin efisien, yakni biaya kecil tetapi hasil PAD yang besar.

2. Kinerja Anggaran PAD

Pada penelitian ini kinerja anggaran PAD dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas daerah adalah rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah, dalam satuan persen.

**Tabel 3. Efektivitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Periode 2014 – 2018 (5 tahun)**

Tahun	Realisasi PAD (Rupiah)	Anggaran PAD (Rupiah)	Efektivitas (%)
2014	112.070.916.727,51	86.131.560.841,00	130,12
2015	115.369.533.323,35	122.188.461.211,00	94,42
2016	136.313.232.054,73	138.015.117.571,00	98,77
2017	140.621.664.388,48	140.990.173.492,00	99,74
2018	134.343.383.709,76	150.834.948.804,00	89,07

Sumber: data olahan BKD, 2020

Relaisasi PAD dan anggaran/target PAD merupakan data dokumen keuangan yang diperoleh dari BKD Kota Parepare, sedangkan efektivitas adalah olahan data, dengan menggunakan rumus rasio Efektivitas anggaran PAD, yakni

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran/target PAD}} \times 100\%$$

Interpretasi rasio efektivitas PAD adalah: realisasi PAD yang diterima diharapkan mendekati atau sama, bahkan melebihi target anggaran PAD, semakin besar rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa realisasi PAD yang diterima semakin mendekati target PAD yang ditentukan. Jika rasio efektivitas mencapai 100%, menunjukkan bahwa realisasi PAD sama atau mencapai target PAD. Jika rasio efektivitas di atas 100%, menunjukkan bahwa realisasi PAD sukses melampaui target/anggaran PAD yang ditentukan. Hal ini berarti bahwa semakin besar rasio efektivitas PAD, menunjuka bahwa kinerja keuangan semakin efektif.

3. Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap kinerja anggaran PAD dapat diketahui dengan menggunakan regresi linear sederhana.

a. Regresi Linear Sederhana

Metode ini digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yaitu rasio efesiensi (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu efektivitas PAD (Y). persamaan umum regresi linear sederhananya adalah: $Y = a + bX$ yang masing-masing komponen a dan b diperoleh dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4. Data Output SPSS Koefisien Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	76.156	74.391		1.024	.381
	Efesiensi	1.799	5.065	.201	.355	.746

a. Dependent Variable: Efektivitas

Berdasarkan tabel 4 dapat dituliskan persamaan regresi linear berganda yakni: $Y = 76,158 + 1,799X$. Interpretasi dari persamaan regresi ini adalah: jika efektivitas yakni rasio efesiensi adalah 0, maka efektivitas adalah 76,158. Jika rasio efesiensi adalah 1, maka efektivitas adalah $76,158 + 1,799$, dan seterusnya, semakin besar efesiensi maka efektivitas juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa efesiensi berpengaruh positif terhadap efektivitas.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji pengaruh dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel efesiensi terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hipotesis yang diajukan adalah:

- 1) H_0 = tidak ada pengaruh efesiensi (X) terhadap efektivitas (Y)
- 2) H_1 = ada pengaruh efesiensi (X) terhadap efektivitas (Y)

Tabel hasil olahan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 2.2, dalam tabel Anova sebagai berikut:

Tabel 5. Data Output SPSS tabel Anova ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	41.575	1	41.575	.126	.746 ^b
	Residual	988.443	3	329.481		
	Total	1030.017	4			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), Efesiensi

Uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig dengan probabilitas 5% (0,05), dengan dasar pengambilan keputusan yakni:

- 1) Jika nilai signifikansi (sig) < dari probabilitas 0,05, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi (sig) > dari probabilitas 0,05, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima.

Berdasarkan Tabel 5.4, menunjukkan bahwa nilai sig adalah $0,746 > 0,05$, maka pengambilan keputusan berlaku H_1 diterima, atau dapat dikatakan bahwa efisiensi PAD berpengaruh terhadap efektivitas PAD.

PEMBAHASAN

1. Efisiensi Keuangan Daerah Kota Parepare

Pada efisiensi keuangan daerah Kota Parepare, periode tahun 2014 – 2018, menunjukkan flutuasi khususnya antara tahun 2014-2016, kemudian trend penurunan terjadi dari tahun 2016-2018 yang menunjukkan keuangan daerah dikelola semakin efisien.

Pada umumnya biaya/belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan/kinerja pengelola keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Pada tabel menunjukkan bahwa biaya/belanja yang dilakukan daerah cenderung naik, akan tetapi kenaikan ini jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh yakni realisasi PAD yang diterima, juga mengalami kenaikan yang lebih besar. Artinya belanja yang dikeluarkan disertai dengan hasil penerimaan PAD yang lebih besar.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin.

Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

2. Kinerja Anggaran PAD Kota Parepare

Kinerja anggaran PAD umumnya diukur dengan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, dan rasio efektivitas. Pada penelitian ini kinerja anggaran diukur dengan rasio efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan anggaran/target PAD. Apabila dalam perbandingan ini mencapai 100% atau lebih, berarti bahwa realisasi penerimaan PAD berhasil mencapai target, bahkan melebihi targetnya.

Tabel menunjukkan bahwa realisasi PAD dibandingkan dengan target anggarannya untuk periode 2014 – 2018 berflutuasi, dan cenderung menurun, tetapi secara umum kinerja yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas relatif masih dianggap baik, karena antara realisasi dengan target anggaran tidak terlampau jauh selisihnya. Artinya realisasi penerimaan PAD mendekati dengan target anggaran yang hendak dicapai.

3. Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, diperoleh hubungan bahwa efisiensi PAD berpengaruh terhadap efektivitas PAD. Hal ini dikarenakan efisiensi dan efektivitas, keduanya bergantung kepada besaran realisasi PAD yang diterima oleh daerah. Sehingga apabila semakin efisien dalam mengelola PAD, menunjukkan bahwa pengelolaannya makin efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare berfluktuatif dan cenderung menurun pada periode 2014-2018.
2. Kinerja anggaran daerah Kota Parepare berfluktuatif dan cenderung menurun pada periode 2014-2018.
3. Efisiensi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efektivitas PAD Kota Parepare.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap efisiensi PAD, sebaiknya meneliti variabel yang berhubungan satu dengan yang lainnya.
2. Bagi BKD Kota Parepare, pelaksanaan penelitian dan laporan hasil penelitian ini, dapat menjadi acuan dalam memperbaiki perencanaan kinerja keuangan daerah Kota Parepare.
3. Bagi pengamat manajemen keuangan, khususnya keuangan daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi literature yang menambah wawasan tentang efisiensi Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya pengaruh kemandirian keuangan daerah, yakni dengan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan lain selain PAD, seperti pendapatan dari pusat, provinsi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Deva, Amri, Yudi 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21. Edisi Tujuh*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafidh. 2013. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Karlina, A., & Handayani, N. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 1-15.
- Mahmudi. 2006, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ronald dan Sarmiyarningsih. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukan Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo*.
- Saragih, Juli P. 2010. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Suyana Utama, Made. 2009. *Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.